

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, William. G.,
2005
”*Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*”, YPKIK, Jakarta.
- Baringbing, RE,
2001
”*Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*”, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Brigjen Pol. H. Hadiman,
1987
”*Kamus Istilah Polri*”, Mabes Polri, Jakarta.
- Brotodiredjo, Soebroto,
1997
”*Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia*”, Yuseha, Bandung.
- Dharmawan, Allan Satya,
2007
”*Pengungkapan Jaringan Kejahatan Narkoba Oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar*”, Tesis, KIK-UI, Jakarta.
- Eka.C.R, Dhian,
2004
”*Implementasi Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Penyidikan Di Polres Deli Serdang*”, Skripsi Un.Panca Budi, Medan.
- Harahap. M. Yahya,
2003
”*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H.L.A.,
1961
”*Concept of Law*”, Oxford University Press, Oxford.
- Kansil, C.S.T,
1983
”*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Karjadi.M.,
1975
”*Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum*”, Politea, PT. Karya Nusantara Cab. Bandung, Bogor.
- Kelana, Momo,
2002
”*Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*”, Jakarta, PTIK “Press”.
- Kunarto, ed.,
2001
”*Perilaku Organisasi Polri*”, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
- LAN.RI
2003
Sistem Administrasi NKRI (SANKRI), Jakarta,

Artikel dan Makalah:

“*Diskresi Kepolisian*”, Dr. Jusuf. MM, dkk, KIK.UI, Jakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008.

Peraturan Perundangan :

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/ 1205/ IX/ 2000 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Petunjuk Teknis No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Petunjuk Teknis No.Pol.: JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Petunjuk Pelaksanaan No.Pol.: JUKLAK/ 37/ VII/ 1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/ 7/ I/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri.